



Saya Tak Pernah Nikmati Uang Perdin

■ Kejari Tahan Gusti Patra ■ Dugaan Korupsi Perdin DPRD Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan lima jam lebih oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Kamis (21/7). Gusti Patra ditahan terkait kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar.



TRIBUN BALI/INYOMAN MAHAYASA

DITAHAN - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra menutupi wajahnya dengan tas gendong saat naik mobil tahanan di Kejari Denpasar, Kamis (21/7).

Saat akan dibawa dari ruang pemeriksaan lantai II Kejari Denpasar menuju mobil tahanan, Patra yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye menutupi wajahnya dengan tas punggung warna hitam.

Ditanya tentang penahanannya, tersangka yang menjabat sebagai staf administrasi bagian Sekretaris Dewan pada tahun 2013 tak banyak berkomentar. Sembari bergegas masuk ke mobil tahanan Kejari Denpasar, dirinya menyatakan tidak pernah menikmati uang terkait kasus ini.

Saat ditanyakan apakah dirinya dikorbankan dalam kasus ini, Patra menyatakan tidak tahu. "Saya tidak ada menikmati uang," ujarnya dari dalam mobil tahanan kejaksaan nomor polisi B 8760 ZQ, dan penyidik kejaksaan pun langsung membawa tersangka menuju Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar untuk ditahan sekitar pukul 18.30 Wita.

Patra akan ditahan selama 20 hari

ke depan dan akibat korupsi perdin ini. Penasihat hukum tersangka, Ketut Rinata, usai penahanan mengatakan, pihaknya akan berupaya mengajukan penangguhan penahanan. "Itu kan haknya tersangka," tegasnya.

Dijelaskannya, Patra dalam kegiatan perjalanan dinas anggota dewan Denpasar hanya bertugas sebagai administrasi. Yang tugasnya hanya menulis perjalanan dinas anggota dewan.

Jika kliennya hanya bertugas sebagai administrasi, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Ditanya seperti itu Rinata menyatakan bagian keuangan. "Ya bagian keuangan sekwan. Tersangka kan hanya sebagai administrasi, dia menulis perjalanan dinas anggota dewan," ucapnya.

Disinggung kembali apakah kliennya ikut menikmati uang perdin, dengan tegas Ritana membantah dan yakin jika kliennya tidak ikut menikmati. "Saya yakin dia tidak menikmati uang. Orang dia tidak pegang uang,"

jawabnya

Sebelumnya penyidik pidsus Kejari Denpasar di bawah pimpinan Kajari Erna Normawati Widodo Putri ini telah memeriksa beberapa saksi dari anggota DPRD Kota Denpasar yakni Ketut Nuada dari Fraksi Demokrat, I Putu Oka Mahendra (Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (Fraksi Indonesia Raya), Kadek Agus Arya Wibawa (Fraksi PDIP), AA Susruta Ngurah Putra (Fraksi Demokrat), dan Ketut Arya, mantan anggota DPRD Fraksi Demokrat.

Kejari juga telah memeriksa Direktur Bali Travel Daksina I Made Kayun, Manajer Marketing Bali Travel Daksina, Gede Sutiawan dan IB Putu Sudhantana dari travel Sunda Duta.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir mengungkapkan, penetapan tersangka Patra berdasarkan pemeriksaan maraton yang dilakukan jaksa penyidik selama ini. Namun, saat disinggung ada tersangka baru menyusul, Syahrir mengaku tidak bisa memastikan.

"Ya lihat saja nanti seperti apa. Kan, pemeriksaan masih terus berlanjut," terangnya. Mereka yang akan diperiksa adalah sejumlah anggota dewan dan pihak terkait dalam perdin.

Terkait kerugian negara, Syahrir menyebut cukup besar. Bahkan, awalnya penghitungan kejaksaan tidak sampai Rp 1 miliar. Namun, setelah ada hasil audit BPKP Bali, ternyata kerugian negara membengkak tiga kali lipat dari penghitungan awal kejaksaan.

Didesak angka kerugian, Syahrir menyebut angkanya cukup besar. "Hasil audit BPKP sudah ada, cuma secara resmi belum. Perhitungan kerugian kami kecil tidak sampai 1 miliar, ternyata setelah diaudit BPKP tiga kali lipat," tandas Syahrir.

Dalam perkara dugaan korupsi perdin ini, yang menjadi fokus penyidikan Kejari Denpasar yakni Perdin tahun 2013. Selama setahun dana Perdin DPRD Kota Denpasar diperkirakan mencapai Rp 6 miliar. (can)

Edisi : Jumat, 22 Juli 2016

Hal : 1